

BAB I

**EVALUASI PENGENDALIAN INTERN TERHADAP SISTEM
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DAN MURABAHAH PADA LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH**

A. Latar Belakang Masalah

Usaha perbankan di Indonesia merupakan bagian yang penting dari struktur perekonomian suatu negara. Hal ini dapat dilihat dari bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha yang dijalaninya. Perbankan di Indonesia juga berperan dalam menumbuhkan semangat kewirausahaan dengan memberikan bantuan pinjaman kredit kepada para pengusaha dengan tingkat bunga yang rendah. Potensi dunia usaha perlu ditunjang dengan bantuan dana murah yang cukup memadai melalui lembaga-lembaga keuangan yang menyediakan jasa perkreditan dan tingkat bunga yang rendah dan prosedur yang sederhana. Jasa perkreditan ini bertujuan menyediakan dana atau modal bagi dunia usaha baik skala besar maupun kecil untuk melakukan investasi modal. Dalam melakukan pemberian kredit lembaga keuangan menggunakan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya dalam bentuk simpanan sehingga kepentingan dan kepercayaan masyarakat dapat dilindungi dan dipelihara.

Salah satu lembaga keuangan yang menyalurkan dana yang tidak berorientasi pada keuntungan semata adalah BMT (Baitul Maal Wattamwil), berbeda dengan bank

Wattamwil).berbeda dengan bank konvensional yang dalam kegiatan usahanya dengan menggunakan sistem bunga. BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang melakukan kegiatan usaha dengan menyediakan produk penghimpunan dana (financing) dan penyaluran dana (funding) berdasarkan prinsip syariah yaitu dengan sistem bagi hasil. Tujuan didirikan yaitu untuk mengatasi hambatan operasionalisasi bank yang selama ini di nilai kurang menjangkau usaha masyarakat lapisan bawah atau masyarakat kecil dan menengah (sudarsono:2003). Dan salah satunya adalah pada BMT Al-Ikhlas, BMT Al-Ikhlas dalam kegiatan operasinya memiliki komitmen untuk mengambil peran dalam pemberdayaan ekonomi rakyat dengan memberikan pinjaman yang lunak dan sederhana. Dalam lembaga keuangan syariah kredit lebih dikenal dengan istilah pembiayaan.

Didalam lembaga keuangan syariah mencakup dua jenis kegiatan sekaligus, yakni mengumpulkan kekayaan dari berbagai sumber dan mendistribusikannya kepada yang berhak, serta menyelenggarakan kegiatan penyaluran dana yang tidak berorientasi pada keuntungan semata, dengan tujuan mengatasi kemiskinan dan menciptakan kegiatan produktif dalam rangka menciptakan nilai tambah baru (*new value added*), serta mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Didalam pengoperasiannya lembaga keuangan syariah menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam yang dengan tidak menggunakan perangkat bunga.

oleh bank-bank pada umumnya mengandung unsure *riba*. Menurut istilah teknis dalam hukum Islam, *riba* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok (modal) secara tidak benar dan diharamkan (Perwataatmadja dan Syafi'I, 1992). Sehubungan dengan sistem operasinya yang tidak menggunakan perangkat bunga tersebut, maka lembaga-lembaga keuangan syariah sering disebut juga *lembaga keuangan tanpa bunga*.

Pengendalian adalah suatu proses yang mengkoordinasikan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan Unit Organisasi/Satker, untuk menjamin agar kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana dan berdasarkan peraturan yang berlaku, guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara yang berdaya guna. Pengendalian harus dilaksanakan dalam usaha peningkatan profesionalisme sehingga kesalahan, penyelewengan dapat ditekan seminimal mungkin. Pengendalian perlu dirancang dalam sistem menyeluruh dan menyatu dengan sistem organisasi unsure dalam perusahaan dapat terkendali.

Pengertian pengendalian intern menurut Mulyadi (2001) adalah hal-hal yang berkaitan dengan struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Pengendalian intern dipengaruhi oleh manusia yang berarti tidak hanya terdiri dari buku pedoman kebijakan dan formula-formula tetapi juga orang-orang

merupakan alat ukur mencapai tujuan-tujuan dalam berbagai hal yang satu sama lain saling mempengaruhi.

Unsur pokok pengendalian intern (Mulyadi, 2001) adalah:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.
3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Bagi perusahaan, sistem pengendalian intern dapat digunakan secara efektif untuk mencegah penggelapan maupun penyimpangan. Dengan kata lain, sistem pengendalian intern memberikan kepastian bahwa penggelapan laporan keuangan dapat dicegah atau dideteksi lebih dini (Halim:2001).

Akuntansi sebagai suatu sistem informasi, melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data keuangan perusahaan, untuk kemudian mengkomunikasikannya kepada pihak yang berkepentingan untuk digunakan sebagai alat bantu di dalam membuat keputusan-keputusan yang menyangkut perusahaan. Akuntansi disini sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan yang kuantitatif kepada berbagai pihak yang dengan perusahaan secara garis besar pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan dikelompokkan menjadi dua, yaitu pihak intern misalnya : manajemen dan pihak eksternal seperti

diberikan tersebut maka pihak yang berkepentingan akan dapat membuat keputusan yang tepat. Tentunya juga harus didukung dengan informasi keuangan yang dapat diandalkan untuk dapat dipercaya baik oleh pihak manajemen maupun pihak lain, maka diperlukan suatu rancangan sistem pengendalian intern yang baik di perusahaan.

Pengendalian intern mengandung keterbatasan yang melekat atau bawaan, dimana salah satunya adalah manusia yang ada pada prosedur pengendalian, sehingga belum tentu pengendalian intern tersebut sudah efektif. Misalnya salah paham terhadap intruksi-intruksi, ketidaktelitian, kelelahan, ketidakadilan, pelanggaran-kebijakan atau prosedur yang ada oleh manajemen, kecurangan dan adanya kolusi antar karyawan maupun dengan pihak luar. Oleh karena itu untuk meyakinkan keefektifan pelaksanaan sistem tersebut, perlu dilakukan pengujian. Pengujian itu disebut dengan istilah pengujian kepatuhan (*complain test*) atau sering disebut dengan istilah pengujian pengendalian (*test of kontrol*). Dalam hal ini dilakukan pengujian terhadap transaksi pemberian pembiayaan musyarakah dan murabahah pada lembaga keuangan syariah kemudian mengikuti jalannya pelaksanaan transaksi dari awal sampai selesainya transaksi pemberian pembiayaan melalui dokumen-dokumen serta catatan akuntansi yang dibuat.

Berkaitan dengan perekonomian umat, sebagai suatu lembaga keuangan yang memiliki fungsi pokok sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang kelebihan dana dengan kekurangan dana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, lembaga keuangan syariah melakukan

pengumpulan dana (*funding*) dan penyaluran dana (*financing*). Penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah merupakan suatu pemberian pembiayaan atau kredit kepada masyarakat yang membutuhkan, baik untuk modal usaha atau konsumsi. Pembiayaan (kredit) adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu penjaminan dengan janji pembayaran yang ditangguhkan pada jangka waktu yang telah disepakati.

Pengertian pembiayaan (pada bank syariah), menurut Undang-undang No10/1998 : Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan yang lunak dan sederhana diharapkan akan dapat membuat pengusaha kecil, menengah dan swasta/PNS tidak lagi terjerat rentenir. Bagi para pengusaha dan pegawai, pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan syariah sangat membantu dalam membantu dalam memenuhi kebutuhan mereka. Selain memberikan kemudahan dalam prosedur dan syarat pembiayaan, sistem yang digunakan lebih aman dari segi agama karena menggunakan prinsip bagi hasil yang ditentukan atas kesepakatan pada awal pengajuan pembiayaan. Bagi lembaga keuangan syariah sendiri selain mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil dari pembiayaan yang diberikan, juga menanggung risiko yang kecil karena

melakukan pembiayaan tersebut lembaga syariah harus menunjangnya dengan pengendalian intern dan pengawasan yang baik dengan didukung kredibilitas kinerja pegawai yang kompeten dibidangnya.

Kegiatan perkreditan bank merupakan kegiatan menanamkan dana yang sering menjadi penyebab utama bank menghadapi masalah besar. Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa stabilitas usaha bank sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dalam mengelola kredit. Keberhasilan dalam mengelola kredit akan tercapai apabila didalam perusahaan terdapat pengendalian intern yang baik yang dapat menjadi alat pengendalian dan pengawasan kredit yang diberikan.

Walaupun keputusan pembiayaan telah dihasilkan dari pertimbangan yang rasional, nampaknya lembaga keuangan konvensional dan syariah tidak bisa lepas dari risiko pembiayaan bermasalah, yang berarti tidak kembalinya pembiayaan (kredit) yang diberikan. Faktor penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah seringkali disebabkan oleh lemahnya pengawasan atau pengendalian intern, terutama dalam melakukan analisis pembiayaan. Risiko pembiayaan bermasalah ini akan lebih besar dihadapi oleh lembaga keuangan syariah dari pada lembaga keuangan konvensional. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya sistem bagi hasil yang didasarkan pada hasil usaha nasabah, yang tingkat keuntungannya akan naik atau turun, dan adanya risiko kerugian yang akan ditanggung bersama.

Risiko tersebut semakin tampak ketika perekonomian dilanda krisis atau

perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar utang-utangnya. Hal ini semakin diperberat oleh meningkatnya tingkat bunga. Ketika bank akan mengeksekusi kredit macetnya, bank tidak akan memperoleh hasil yang memadai karena jaminan yang ada tidak sebanding dengan besarnya kredit yang diberikan.

Karena itu dalam memutuskan suatu pembiayaan, lembaga syariah perlu melakukan analisis yang lebih tajam terhadap aspek-aspek yang berhubungan dengan usaha calon debitur berdasarkan informasi yang relevan, tepat waktu, dan akurat. Analisis pembiayaan merupakan bagian dari sistem pembiayaan yang pada akhirnya keefektifan dan keefisienan sistem tersebut akan membantu menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan dalam melakukan pembiayaan, disamping perlunya dukungan Sistem Pengendalian Intern (*internal kontrol*) yang efektif.

Dengan Sistem Pengendalian Intern yang efektif maka asset-aset perusahaan akan terjaga, sehingga tingkat efektifitas dan efisiensi akan terus berkembang yang pada akhirnya akan meningkatkan laba suatu perusahaan.

Seiring dengan bertambahnya anggota atau debitur pembiayaan musyarakah dan murabahah pada BMT Al-Ikhlas, maka semakin sering juga transaksi pembiayaan yang terjadi. Hal ini memungkinkan terjadinya kesalahan dalam proses tersebut. Kesalahan itu dapat bersifat kelalaian atau kesengajaan yang

pelaksanaan prosedur pembiayaan musyarakah dan murabahah sudah efektif maka perlu dilakukan evaluasi atas pengendalian intern.

Berdasarkan pemikiran diatas, peneliti merasa tertarik untuk meneliti masalah sistem pengendalian intern lembaga keuangan syariah dalam pemberian pembiayaan (kredit) dengan menyusun skripsi **Evaluasi pengendalian intern terhadap sistem pembiayaan musyarakah dan murabahah pada lembaga keuangan syariah.**

B. Perumusan Masalah

Dari uraian tersebut diatas, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah apakah sistem pengendalian intern perusahaan terhadap pembiayaan (kredit) yang dikelolanya dapat diandalkan, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan BMT Al-Ikhlās

C. Batasan Masalah

Evaluasi yang dilakukan terhadap suatu sistem perusahaan atau organisasi akan mempunyai ruang lingkup yang sangat luas sehingga disini penulis akan membatasi ruang pada unsur-unsur sistem pengendalian intern terhadap

... yang terjadi di lembaga

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- 1.4.1 Mengetahui kendala sistem pengendalian intern yang diterapkan terhadap pembiayaan yang dikelolanya.
- 1.4.2 Mengetahui keefektifan sistem pembiayaan yang diterapkan.

E. Manfaat Penelitian

1.5.1 Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori-teori yang diperoleh selama berada dibangku kuliah melalui hasil-hasil yang akan dicapai sehubungan dengan evaluasi yang dilakukan.

1.5.2 Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan bagi pengelola dalam melaksanakan kegiatan pengendalian intern terhadap pembiayaan yang dikelolanya BMT Al-Ikhlas

1.5.3 Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan dapat menambah kepustakaan sebagai